

BAB II

KERANGKA TEORI

2.1. Perspektif Teoritik

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teoritik berupa metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang menggambarkan permasalahan atau kasus yang terjadi di tempat penelitian yang di kemukakan secara fakta dan bersifat kasus kemudian di teliti untuk di pecahkan permasalahannya dan dianalisa yang dimulai dari proses Reduksi data, Serta penyajian data kemudian diTarik kesimpulan secara umum. Informan dalam penelitian ini terdiri dari kepala seksi pelayanan dan Rehabilitasi sosial Disabilitas dan staff pelayanan dan Rehabilitasi sosial Disabilitas dan Komunitas penyandang disabilitas, pengumpulan data menggunakan Teknik wawancara serta observasi untuk Data Primer dan Dokumentasi untuk Data Sekunder.

2.2. Pemerintahan

2.2.1. Pengertian Pemerintahan

Berdasarkan pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk republik, berdasarkan hasil itu dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik.

Pemerintahan berasal dari kata “perintah” yang setelah di tambah awalan “pe” menjadi kata “pemerintahan” dan Ketika mendapat akhir “an” menjadi kata “pemerintahan”, dalam hal ini beda antara “pemerintah” dengan “pemerintahan” adalah karena pemerintah merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan, sedangkan pemerintahan berarti perihal ataupun hal ikhwal pemerintahan itu sendiri (Syafiie, 2011;5).

Di dalam kata dasar “perintah” paling sedikit ada empat unsur penting yang terkandung, yaitu sebagai berikut:

- 1) Ada dua pihak yang terlibat
- 2) Yang pertama pihak yang memerintah di sebut penguasa atau pemerintah
- 3) Yang kedua pihak yang di perintah atau rakyat
- 4) Antara kedua pihak tersebut terdapat hubungan (Syafiie. 2011;5)

Pemerintah adalah gejala social, artinya terjadi di dalam hubungan antara anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok maupun antara

individu dengan kelompok. Gejala ini terdapat pada suatu saat di dalam sebuah masyarakat (Ndraha. 1997;6). Istilah pemerintah berasal dari kata perintah. Dalam konteks ini Ndraha menyatakan bahwa istilah perintah secara umum dimaknai sebagai yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu atau sesuatu yang harus dilakukan. Dengan demikian, pemerintah dapat diartikan sebagai orang, badan atau aparat yang mengeluarkan atau memberi perintah.

Syafiie (2011;10) menyimpulkan bahwa pemerintahan adalah kelompok-kelompok orang tertentu secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam mengkoordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.

Pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintahan di pandang memiliki objek material nya masyarakat, sehingga pemerintahan di maknai sebagai suatu proses menata Kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan atau negara (Munaf. 2016;47).

Ryaas Rasyid (1996) mengumumkan bahwa tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem keterlibatan masyarakat dalam menjalani kehidupannya yang wajar. Pemerintah modern pada hakikat nya adalah pelayanan kepada masyarakat. oleh karena itu, secara umum tugas-tugas pokok pemerintah menurut Ryaas Rasyidin (1996) adalah sebagai berikut:

1. Manajemen keamanan negara dari segala kemungkinan serangan luar, menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintah yang sah melalui cara-cara kekerasan.
2. Memelihara tata tertib dengan memecahkan terjadinya gontok-gontokan di antara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat berlangsung secara damai.
3. Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka. Jaminan keadilan ini terutama harus tercermin melalui keputusan-keputusan, dimana konstitusi dan hukum yang berlaku dapat ditafsirkan dan diterapkan secara adil dan tidak memihak, serta dimana perselisihan bisa didamaikan.

4. Melakukan pekerjaan atau urusan umum dan memberi pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh Lembaga non pemerintahan atau yang akan lebih baik juga dikerjakan oleh pemerintah.
 5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
 6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas serta kebijakan lain yang secara langsung meminjam peningkatan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat.
 7. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan suber daya alam dan lingkungan hidup.
- Berdasarkan uraian di atas maka tugas pemerintah adalah mengatur dan melayani masyarakat. tugas pengaturan lebih menekankan kekuasaan yang melekat pada jabatan birikrasi. Sedangkan tugas melayani menekankan pada upaya mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik, mempersingkat waktu proses pelaksanaan urusan public, serta memberikan kepuasan publik.

2.3. Dinas Sosial

Dinas Sosial atau lembaga sosial adalah suatu Lembaga yang didalamnya terdapat struktural atau pekerja-pekerja sosial dan mempunyai keteraturan dalam pemerintahan sosial dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat, membangun masyarakat dan kepentingan umum lainnya yang berkaitan dengan kemasyarakatan.

Soelaiman Soemardi dalam buku Abdulsyani, mengatakan bahwa Lembaga atau sosial intuition sebagai “lembaga kemasyarakatan”. Kata Lembaga di anggap tepat, kecuali menunjukan pada suatu bentuk, juga mengandung pengertian abstrak tentang adanya kaidah-kaidah. Lembaga itu memiliki tujuan untuk mengatur antara hubungan yang di adakan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang paling penting (Abdulsyani. 2012; 75-76).

Menurut Ramadhani, Sarbani dan Matnuh (2016; 949) Dinas Sosial mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan rumah tangga daerah serta tugas pembantuan dalam bidang pembinaan kesejahteraan social, rehabilitasi social, dan pembinaan kesejahteraan social, dalam pelaksanaan tugasnya dinas social di bantu oleh pekerja sosial.

2.4. Kinerja

2.4.1 Konsep Kinerja

Kinerja organisasi pada dasarnya merupakan tanggung jawab setiap individu yang bekerja dalam organisasi. Apabila dalam organisasi setiap individu bekerja dengan baik, berprestasi, bersemangat dan memberikan kontribusi terbaik mereka terhadap organisasi, maka

kinerja organisasi secara keseluruhan akan baik. Dengan demikian kinerja organisasi merupakan cermin dari kinerja individu (Mahmudi, 2005:22).

Sebuah organisasi dapat berjalan karena ada orang-orang yang menjalankannya, karena itu manusia merupakan elemen utama yang dibutuhkan sebuah organisasi untuk dapat menjalankan visi misinya. Begitu juga sebaliknya orang-orang membutuhkan organisasi sebagai alat untuk mencapai tujuan yang maksimal diperlukan orang-orang yang mampu bekerja dengan baik. Seorang pegawai dapat dikatakan baik apabila kinerjanya dapat sesuai dengan target dan tanggung jawab yang diembannya, kinerja seseorang dapat dikembangkan setiap saat seiring dengan perkembangan zaman yang terus maju.

Secara konseptual, pengkajian kinerja sebuah kelembagaan dapat dilakukan dengan pendekatan organisatoris, terutama yang berkaitan dengan fungsi-fungsi organisasi, dilihat dari segi inilah istilah kinerja dapat disejajarkan artinya dengan istilah performance yang secara konseptual dapat diartikan sebagai pencapaian hasil atau "*The degree of accomplishment*" (Wasistiono, 2002:12).

Nasucha, mengemukakan bahwa kinerja organisasi adalah sebagai efektifitas organisasi secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan melalui usaha-usaha yang sistemik dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus mencapai kebutuhan secara efektif (Pasolong, 2010:177).

Suprihanto (dalam srimulyo, 2001:33) mengatakan bahwa kinerja atau prestasi kerja seorang karyawan pada dasarnya adalah hasil kerja seorang karyawan selama periode tertentu di bandingkan dengan kemungkinan misalnya standar, target atau sasaran atau kinerja yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati Bersama.

Selain itu menurut Amstrong dan Baron kinerja juga disebut sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Kinerja memiliki makna lebih luas bukan hanya menyatakan sebagai hasil kerja atau prestasi kerja tetapi juga bagaimana proses kerja berlangsung. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi (Wibowo, 2008:7).

Vetzal Rival (2004:309) kinerja "merupakan perilaku yang nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan". Nurmiyah Hasibuan dalam Nita (2008:20) mengatakan kinerja adalah hasil prestasi yang diperoleh karyawan, perusahaan, organisasi dan lainnya.

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa definisi kinerja organisasi adalah suatu hasil akhir yang diperoleh setelah suatu pekerjaan atau aktivitas dijalankan selama kurun waktu tertentu yang telah direncanakan sebelumnya.

2.4.2 Indikator Kinerja Organisasi

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kerja harus merupakan suatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Indikator kinerja di gunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja hari demi hari organisasi atau unit kerja yang bersangkutan menunjukkan kemampuan dalam rangka dan/atau menuju tujuandan sasaran yang telah ditetapkan (Sedarmayanti, 2010:198).

Penilaian kinerja (*performance appraisal*) juga pada dasarnya menggunakan factor kunci guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien, karena adanya kebijakan atau program yang lebih baik atas sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. Penilaian kinerja individu sangat bermanfaat bagi dinamika pertumbuhan organisasi secara keseluruhan, melalui penelitian tersebut.

Menurut Kumorotomo dalam Pasolong, (2010:180) menggunakan beberapa indicator kinerja untuk dijadikan pedoman dalam menilai kinerja birokrasi public, antara lain:

1. Efisiensi yaitu menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan public dalam memanfaatkan factor-faktor produksi serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomis.
2. Efektivitas yaitu apakah tujuan yang didirikan organisasi pelayanan public tersebut tercapai, hal tersebut erat kaitannya dengan rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi serta fungsi agen pembangunan.
3. Keadilan yaitu mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan oleh organisas pelayanan publik, kriteria ini erat dengan kaitannya dengan konsep ketercukupan atau keadilan.
4. Daya Tanggap yaitu organisasi pelayanan public merupakan bagian dari daya tanggap negara atau pemerintah akan kebutuhan masyarakat yang mendesak, oleh karena itu organisasi secara keseluruhan harus dapat dipertanggung jawabkan secara transparan demi memenuhi kriteria daya tanggap ini.

Sedangkan menurut Dwiyanto (2008:48-49) dalam buku (Reformasi Birokrasi Indonesia) menjelaskan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik, yaitu:

1. Kualitas Layanan, isu mengenai kualitas layanan cenderung semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negative yang terbentuk mengenai organisasi public muncul karena ketidak puasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik keuntungan utama menggunakan kepuasan masyarakat seringkali tersedia secara mudah dan murah. Informasi mengenai kepuasan terhadap kualitas pelayanan seringkali dapat diperoleh dari media masa dan diskusi publik. Akibat akses terhadap informasi mengenai kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan relative sangat tinggi, maka bis amenjadi suatu ukuran kinerja organisasi publik yang mudah dan murah dipergunakan. Kepuasan masyarakat bisa menjadi parameter untuk menilai kinerja organisasi publik.
2. Responvisitas, yaitu kemampuan organisasi untuk mengenai kebutuhan masyarakat, Menyusun agenda dan prioritas pelayanan, mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. secara singkat Responsivitas menunjukan pada keselarasan program dan kegiatan pelanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. secara singkat responsivitas menunjukan pada keselarasan program dan kegiatan pelanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas termaksud kedalam indikator kinerja karena secara langsung responsivitas menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah di tunjukan dengan ketidak selarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat, hal tersebut jelas menunjukan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasinya.
3. Responbilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan birikratsi itu sesuai dengan prinsip administrasi yang benar dengan kebijakan birokrasi baik yang ekspilisit san implisit.
4. Akuntabilitas, akuntabilitas publik menunjukan pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat public yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa pejabat politik dipilih oleh rakyat dengan sendirinya akan selalu mempersentasekan kepentingan rakyat.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pandangan negative bagi birokrasi publik muncul karena ketidak puasan masyarakat terhadap kualitas layanan. Maka dari itu pelayanan publik harus diperbarui setiap tahunnya agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, oleh karena itu kemampuan birokrasi publik untuk menampung dan mengelol aspirasi masyarakat haruslah ditingkatkan dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

2.5.Konsep Pembinaan

Menurut Ismail (2001: 154). Mendefinisikan pembinaan sebagai proses komunikasi dua arah yang menghubungkan pusat pengetahuan dengan penerima atau pekerja dan pemerintah akhir (masyarakat). dan tujuan pembinaan adalah supaya masyarakat dapat meningkatkan taraf kearah yang lebih baik sejahtera dan sempurna. (Ismail, Malimunah. 2001. Pengembangan implikasi keatas pembangunan masyarakat. Jakarta: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementrian Indonesia).

Lebih lanjut Wicaksono (2006: 23) menyatakan pembinaan dapat diartikan sebagai upaya memelihara membawa suatu keadaan yang seharusnya terjadi atau menjaga keadaan sebagaimana mestinya (Wicaksono, Kristian widya. 2006. Administrasi dan birokrasi pemerintahan, Yogyakarta: Graha ilmu). Menurut Mitha Thoha (2008:207) pembinaan adalah suatu Tindakan, proses, hasil, atau pernyataan yang lebih baik, dalam hal ini menunjukan adanya kemajuan peningkatan pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Maka Dalam hal ini suatu pembinaan menunjukan adanya suatu kemajuan peningkatan, atas berbagai kemungkinan peningkatan, unsur dari suatu tujuan dan pembinaan menunjukan kepada perbaikan atas sesuatu istilah pembinaan hanya diperanan kepada unsur manusia, oleh karena itu pembinaan harus mampu menekan dan dalam hal-hal persoalan manusia. Hal ini sejalan dengan pendapat Miftha Thoha (2008) dalam bukunya yang berjudul “Pembinaan Organisasi” mendefinisikan, pengertian pembinaan bahwa:

Pembinaan adalah suatu Tindakan, proses, atau pernyataan menjadi lebih baik.

1. Pembinaan merupakan suatu strategi yang unik dari suatu sistem pembaharuan dan perubahan (change).
2. Pembinaan merupakan suatu pernyataan yang normative, yakni menjelaskan bagaimana perubahan dan pembaharuan yang berencana serta pelaksanaannya.
3. Pembinaan berusaha untuk mencapai efektifitas, efisiensi dalam suatu perubahan dan pembaharuan yang dilakukan tanpa mengenal berhenti. (Miftah, 1997:16-17).

Pembinaan ialah merupakan usaha yang dilakukan dengan sadar, berencana, terarah, teratur untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan seseorang dengan Tindakan bimbingan, pengarahan, pengawasan untuk mencapai tujuan yang diharapkan (Depdiknas, 2002). Dalam menangani masalah yang dihadapi penyandang disabilitas tersebut, merupakan tugas sebagaimana yang dikembangkan oleh pemerintah tentang pembinaan dan kesejahteraan penyandang disabilitas dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik jasmani, rohani maupun sosialnya.

Tanggildintin (2008:61) mengatakan pembinaan akan menjadi suatu “*empowerment*” atau pemberdayaan dengan maksud:

1. Menyadarkan dan membebaskan
2. Memekarkan potensi dan membangun kepercayaan diri.
3. Menumbuhkan kesadaran kritis-konstruksi-bertanggungjawab
4. mendorong mereka berperan sosial-aktif.

2.6. Penyandang Disabilitas

2.6.1 Konsep Penyandang Disabilitas

Istilah Disabilitas berasal dari Bahasa Inggris yaitu *Different ability* yang artinya manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Terdapat beberapa istilah penyebutan menunjuk menyebut pada penyandang Disabilitas, Kementerian Sosial menyebut dengan istilah penyandang cacat, Kementerian Pendidikan Nasional menyebut dengan istilah berkebutuhan khusus dan kementerian Kesehatan menyebut dengan istilah penderita cacat. Menurut Resolusi PBB Nomor 61/106 tanggal 13 Desember 2006, penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang tidak mampu menjamin oleh dirinya sendiri, seluruh atau Sebagian, kebutuhan individual normal dan/atau kehidupan social, sebagai hasil dari kecacatan mereka, baik yang bersifat bawaan maupun tidak, dalam hal kemampuan fisisk atau mentalnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia, penyandang cacat atau disabilitas merupakan kelompok masyarakat rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenan dengan kekhususannya. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan social, penyandang cacat atau disabilitas digolongkan sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah social. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, penyandang disabilitas adalah setiap orang

yang memiliki kelainan fisik dan atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari, penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas adalah orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan auto sensorik dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dalam lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

2.6.2. Jenis-Jenis Penyandang Disabilitas

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat atau Penyandang Disabilitas dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut:

a) Cacat Fisik

Merupakan suatu kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh antara lain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan berbicara. Cacat fisik antara lain sebagai berikut: cacat kaki, cacat punggung, cacat jari, cacat leher, cacat Netra, cacat rungu, cacat wicara, cacat raba (rasa), dan cacat pembawaan. Cacat Tubuh atau Tuna Daksa berasal dari kata Tuna yang memiliki arti Rugi atau Kurang, sedangkan Daksa memiliki arti Tubuh. Jadi tuna Daksa ditujukan kepada mereka yang memiliki anggota tubuh tidak sempurna, dan cacat tubuh juga dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Menurut sebab cacat merupakan cacat sejak lahir, dapat disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, dan perang.
2. Menurut jenis cacatnya merupakan putus (amputasi) lengan dan tungkal, cacat sendi, dan otot pada lengan dan tungkal, cacat tulang, cacat tulang punggung, *celebralpatsy* dan cacat lain yang termaksud pada cacat tubuh *orthopedi paraplegia*.

b) Cacat Mental

Merupakan kelainan mental dan atau tingkah laku, baik cacat bawaan maupun cacat karena akibat dari penyakit antara lain sebagai berikut:

1. Retardasi Mental
2. Gangguan Psikiatrik Fungsional
3. Alkoholisme
4. Gangguan mental organik dan efilepsi

c) Cacat Ganda (Disabilitas Fisik dan Mental)

Yaitu keadaan seseorang yang menyandang dua jenis kecacatan sekaligus apabila yang cacat adalah kedua nyam aka akan sangat mengganggu penyandang cacat.

Ada juga menurut Reefani (2013:13), penyandang disabilitas dibagi menjadi beberapa jenis yaitu:

A. Disabilitas Mental

Dalam disabilitas mental ini dibagi menjadi 2 yaitu Mental Tinggi dan Mental Rendah, sebagai berikut:

1. Mental Tinggi, sering dikenal sebagai orang berbakat intelektual, dimana selain memiliki kemampuan intelektual diatas rata-rata dia juga memiliki kereativitas dan tanggung jawab terhadap tugas.
2. Mental Rendah, kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual atau IQ (Intelirgence Quetiont) di bawah rata-rata dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lambat belajar (slow learns), yaitu anak yang memiliki IQ antara 70-90. Sedangkan anak yang memiliki IQ di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.

B. Disabilitas Fisik

Dalam disabilitas fisik atau kelainan fisik terdiri dari beberapa bagian, sebagai berikut:

1. Kelainan Tubuh (Tuna Daksa), merupakan individu yang memiliki gangguan gerak yang du sebabkan oleh kelainan reuro muscular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.
2. Kelainan Pendengaran (Tuna Rungu), merupakan individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen, karena memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara.
3. Kelainan Bicara (Tuna Wicara), merupakan seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui Bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti olah orang lain kelainan bicara ini dapat dimengerti olah orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional dimana kemungkinan disebabkan karena ketuna runguan, dan organic yang memang disebabkan adanya ketidak sempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motoric yang berkaitan dengan bicara.

4. Tuna Ganda (Disabilitas Ganda), tuna ganda atau cacat lebih dari satu kecacatan (cacat fisik dan mental), merupakan mereka yang menyandang lebih dari satu jenis keluar biasa, misalnya penyandang tuna grahitna di sertai dengan penyandang tuna daksa, penyandang tuna rungu sekaligus dengan penyandang tuna Netra.

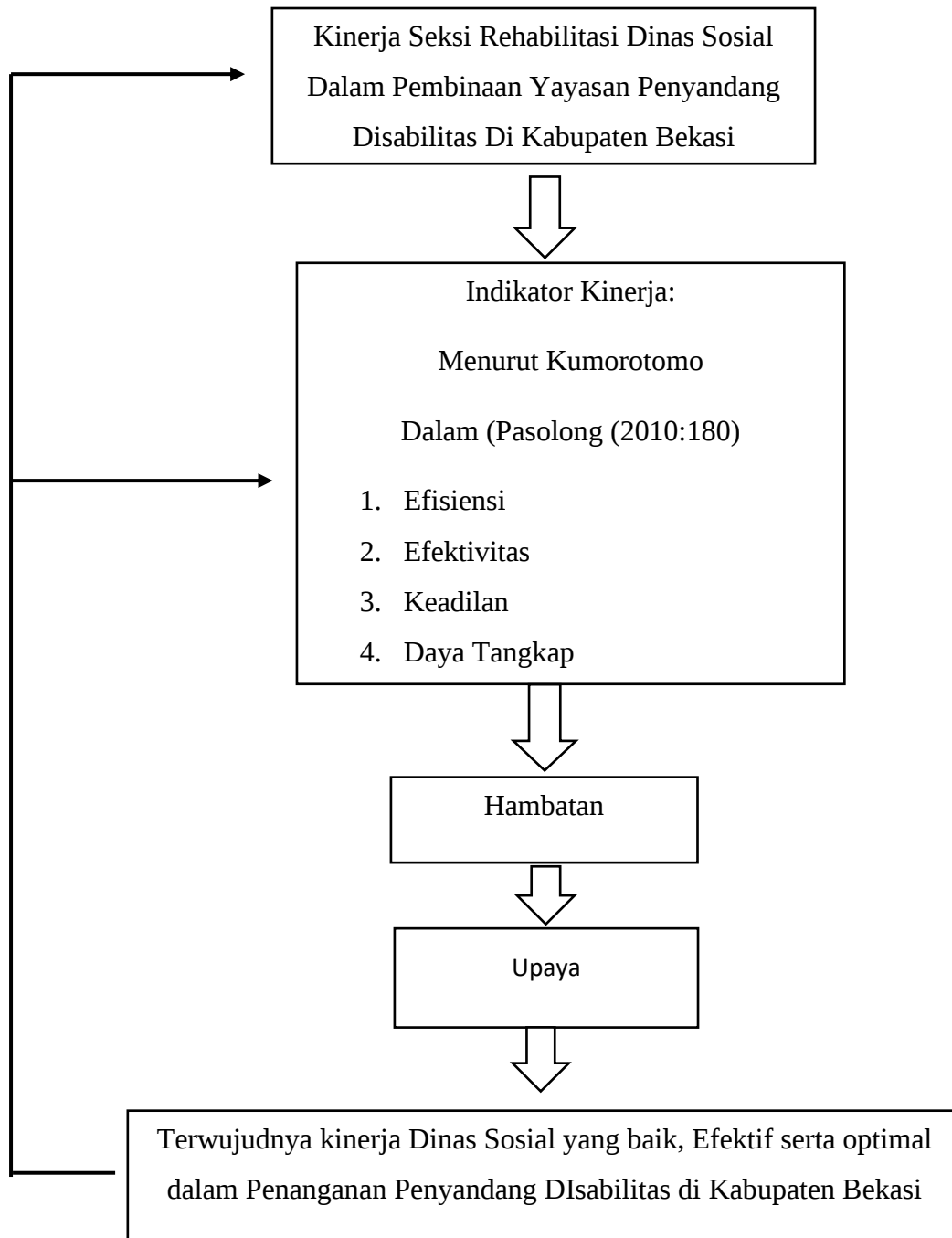
Pada penyandang disabilitas ada derajat kecacatan bagi penyandang disabilitas yang mengacu kepada peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 104/MENKES/PER/11/1999 tentang rehabilitasi medis pada pasal 7 mengatur derajat kecacatan di nilai berdasarkan kegiatan sehari-hari yaitu sebagai berikut:

- a. Derajat cacat 1, mampu melaksanakan aktivitas atau mempertahankan sikap dengan kesulitan.
- b. Derajat cacat 2, mampu melaksanakan kegiatan atau mempertahankan sikap dan bantuan alat bantu.
- c. Derajat cacat 3, dalam melaksanakan aktivitas, Sebagian memerlukan bantuan orang lain dengan atau tanpa alat bantu.
- d. Derajat cacat 4, dalam melaksanakan aktivitas tergantung penuh terhadap pengawasan orang lain.
- e. Derajat cacat 5, tidak mampu melakukan aktivitas tanpa bantuan orang lain dan ketersediaannya.
- f. Derajat cacat 6, tidak mampu penuh melaksanakan kegiatan sehari-hari meskipun di bantu penuh oranglain.

2.7. Kerangka Pemikiran

menurut Sugiyono (2010), mengemukakan bahwa seorang peneliti harus menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar menyusun kerangka pemikiran yang membuahkan hipotesis. Kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara untuk menjelaskan suatu masalah yang akan menjadi objek. Berdasarkan pengertian kerangka pemikiran di atas, dapat di gambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



Sumber: diolah oleh penulis

2.8. Definisi Oprasional

Definisi oprasional adalah definisi yang membutuhkan indicator-indikator sebagai gejala yang mudah untuk mengukurnya. Definisi operasional merupakan penjabaran pengertian suatu gejala, fenomena, atau istilah yang abstrak dengan menurunkannya dengan tingkatan yang lebih konkret melalui bantuan beberapa indikator yang berperan untuk menunjukan dan mengukur suatu gejala atau istilah. Penelitian ini mempunyai variable sebagai berikut:

1. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh Dinas Sosial dalam pembinaan yayasan penyandang disabilitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan atau di bebaskan kepadanya.
2. Rehabilitasi adalah suatu proses kegiatan untuk memperbaiki Kembali dan mengembangkan fisik, kemampuan serta mental seseorang sehingga penyandang disabilitas dapat mengatasi masalah kesejahteraan sosial bagi dirinya sendiri serta keluarganya.
3. Dinas Sosial Kabupaten Bekasi merupakan Dinas yang menangani bagian sosial, salah satu contoh nya seperti pada rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, dimana Dinas Sosial menjalankan program-program binaan untuk para yayasan penyandang disabilitas dan memberikan sembako dan alat bantu yang di butuhkan oleh masyarakat.
4. Pembinaan merupakan suatu usaha, Tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya untuk memperoleh hasil yang lebih baik. maka pembinaan kepada Yayasan, Organisasi atau Lembaga penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Bekasi, dengan ada nya pembinaan tersebut bertujuan agar dapat melatih kepercayaan diri, kemandirian para penyandang disabilitas, dan menambah keahlian atau kemampuan para penyandang disabilitas dalam menjalani aktifitas sehari-hari agar dapat memenuhi kesejahteraannya sendiri.
5. Penyandang Disabilitas merupakan setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk beradaptasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Berbagai perspektif dalam melihat pencapaian keberhasilan melalui kinerja dari pembinaan penyandang disabilitas dapat diketahui melalui indicator-indikator yang

dipergunakan untuk mennyusun kinerja pembinaan penyandnag disabilitas. kinerja dari pembimbing sangat dalam mengetahui penyaelenggaraan pembinaan, kinerja merupakan hasil kerja atau prestasi kerja seseorang dalam suatu organisasi pada periode tertentu dengan menggunakan media yang tepat. Diterapkannya indicator-indikator kinerja dalam pembinaan untuk mengetahui bagaimana mekanisme kinerja tersebut berjalan.

Menurut Kumorotomo dalam (Pasolong (1010:180), mengemukakan bahwa indicator untuk mengatur kinerja pelaksanaan dalam pembinaan penyandang disabilitas sebagai bereikut:

1. Efisiensi

Efisiensi merupakan suatu ukuran yang menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, dalam kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya, apabila diterapkan dan dijalankan secara objektif dan kriteria yang sesuai dengan jangka waktu yang cepat. Apabila kriteria dapat dipenuhi maka akan terbentuk kemampuan sumber daya manusia yang dapat memenuhi tanggung jawabnya dan meningkatkan kemampuannya sehingga pencapaian tujuan tersebut bisa dikatakan relevan. Adapun sub indikator dari efisiensi dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Biaya yang di dikeluarkan untuk menyelesaikan program pembinaan
- b. Waktu yang di butuhkan untuk menyelesaikan program pembinaan

2. Efektifitas

Efektifitas, merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas Dinas sosial Kabupaten Bekasi, baik berupa kegiatan ataupun program-program. Efektifitas menekankan pada hasil yang dicapai seperti efektifitas dengan adanya pembinaan yang dilakukan seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, dalam menjalankan program-program dengan melakukan pembinaan terhadap yayasan penyandang disabilitas di Kabupaten Bekasi. dalam menjalankan program-program yang sudah diagendakan oleh seksi rehabilitasi sosial penyandnag disabilitas berjalan sesuai dengan program atau tidak dapat dilihat, sebagai berikut:

- a. Kuantitas kinerja hasil kinerja para pegawai Dinas Sosial dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan
- b. Kualitas kinerja yang ditunjukkan oleh seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dalam memberikan kinerja yang terbaik bagi Dinas Sosial dan yayasan penyandang disabilitas.
- c. Pemanfaatan waktu seefisien mungkin oleh pegawai dinas sosial dalam menyelesaikan tugas dan program-program yang disesuaikan dengan kebijakan Dinas Sosial.
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia agar terwujudnya hasil yang diharapkan oleh Dinas Sosial, agar dapat meningkatkan efektifitas kerja Dinas Sosial dengan maksimal sehingga dalam pemanfaatan sumber daya manusia dapat lebih berpotensi dan keberhasilan Dinas Sosial dapat tercapai tujuannya.

3. Keadilan

Keadilan, mempertanyakan dan alokasikan layanan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas. Kriteria ini erat kaitannya dengan konsep ketercukupan atau kepantasan, keduanya mempersoalkan apakah tingkat efektivitas tertentu, kebutuhan dan nilai-nilai dalam pembinaan yayasan penyandang disabilitas dapat terpenuhi. Keadilan dapat diketahui dengan mengukur 3 (tiga) hal sebagai berikut:

- a. Keadilan yang berkaitan dengan pembinaan dan alokasi, apabila perbandingan antara program yang diberikan oleh seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan diterima oleh yayasan secara tidak merata, maka yayasan penyandang disabilitas akan merasa bahwa tidak terjadi keadilan.
- b. Keadilan dalam proses pengambilan keputusan, Dinas Sosial dapat dikatakan adil apabila dalam pengambilan keputusan yayasan penyandang disabilitas diberikan kesempatan untuk menyuarakan pendapat dan pandangannya, setelah pengambilan keputusan dilakukan maka yayasan penyandang disabilitas akan mendapatkan porsi yang sama dan seimbang sehingga keadilan.

4. Daya Tanggap

Daya Tanggap, berkaitan dengan pembinaan penyandang disabilitas yang dilaksanakan oleh yayasan penyandang disabilitas Kabupaten Bekasi, kinerja Dinas Sosial seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas merupakan daya tanggap negara atau pemerintah akan kebutuhan vital penyandang disabilitas. oleh sebab itu kriteria dinas sosial seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas tersebut secara keseluruhan harus dapat dipertanggung jawabkan secara transparan demi memenuhi kriteria daya tanggap, seperti berikut:

- a. Kecepatan Dinas Sosial seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dalam menangani masalah yayasan penyandang disabilitas
- b. Kemauan seksirehabilitasi sosial penyandang disabilitas dalam memberikan perhatian secara individu terhadap yayasan penyandang disabilitas
- c. Ketanggapan informasi yang jelas kepada yayasan penyandang disabilitas.

Begitu penting penilaian kinerja bagi keberlangsungan organisasi dalam mencapai tujuan, maka perlu adanya indikator-indikator pengukuran kinerja yang dipakai secara tepat dalam organisasi tertentu.

2.9. Asumsi penelitian

Asumsi merupakan dugaan awal atau tanggapan yang masih bersifat sementara, belum terbukti kebenarannya atau masih memerlukan pembuktian secara objektif sehingga asumsi yang ada dapat digunakan menjadi dasar, landasan berfikir dan Batasan dari sistem penelitian.

Kinerja seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas Dinas Sosial Kabupaten Bekasi dalam melakukan pembinaan terhadap yayasan penyandang disabilitas yang ada di kabupaten Bekasi, perlu perhatian lebih agar para binaan dapat menjadi binaan yang mandiri dan berkualitas, guna bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan sekitarnya. Maka dari itu kinerja seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas Dinas Sosial kabupaten Bekasi membuat atau membentuk program-program yang nanti nya akan di terapkan untuk yayasan penyandang disabilitas kabupaten Bekasi, kegiatan dari program tersebut bisa berupa pemberian motivasi, pembinaan kemandirian dan kegiatan pembinaan kreatifitas, seperti: tuna rungu yaitu pembinaan atau pelatihan mnjahit, pelatihan huruf dail atau braile, Mental pembinaan

kemandirian dan pemberian motivasi, pelatihan pembangunan, Tuna Granita pelatihan kreasi dan kreatifitas seperti membuat kotak tisu, melukis, membatik dll, Tuna Daksa pelatihan nyablon, tata boga, menjahit. Dimana dalam pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keahlian dan kemampuan yang dapat di pergunakan untuk memperbantu perekonomian mereka. Dalam pelaksanaan kinerja seksi rehabilitasi sosoal penyandang disabilitas Dinas Sosial dalam pembinaan yayasan penyandang disabilitas di kabupaten Bekasi menggunakan Indikator kinerja menurut Wahyudi Kumorotomo dalam Pasolong, 2010:180 yaitu: 1) Efisiensi, 2) Efektifitas, 3) keadilan, 4) daya tanggap. Terkait dalam indikator kinerja organisasi dalam pembinaan yayasan penyandnag disabilitas ini Besar kemungkinan masalah tersebut dapat di tuntaskan, namun dalam pelaksanaan setiap program tentunya akan menghadapi hambatan atau masalah. Masalah tersebut tentunya harus diselesaikan dengan upaya untuk mengatasi sebuah permasalahan. Dengan demikian maka Kinerja seksi Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas Dinas Sosial Dalam Pembinaan yayasa Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bekasi.